

# EVALUASI KECUKUPAN JUMLAH GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009

**Tukidi**  
**Jurusan Geografi**  
**Fakultas Ilmu Sejarah Unnes**  
**email: tukidi\_19@yahoo.com**

## **Abstract**

This study aims (1) to obtain information about the conditions of the availability and adequacy of Elementary School (ES) teachers in Sleman Regency in terms of the number, academic qualification, and competence, and (2) to find out the distribution patterns. This study was an evaluation study employing the document analysis. The evaluation steps included: (1) setting the standard for the adequacy of the number of teachers, (2) setting the index of the adequacy of teachers, and (3) analyzing the availability and adequacy of teachers using the quantitative descriptive method. The results of the evaluation show that the availability of teachers is more than the minimum number, being excessive approximately 39%, and availability of teachers in terms of academic qualification and competence meets only 43% and 14% of the minimum number of teachers. Besides, the information shows that the distribution of the number of teachers is not proportional to that of the number of students.

**Kata kunci:** evaluasi, kecukupan, guru SD

## **PENDAHULUAN**

Kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah apabila dilihat dari tiga indikator berikut: (1) peringkat *Human Development Index (HDI)*, Indonesia tahun 2005 menempati peringkat 110 dunia, (2) laporan dari *International Educational Achievement (IEA)*, kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara, dan (3) laporan *World Competitiveness Yearbook* tahun 2000, daya saing SDM Indonesia berada pada posisi 46 dari 47 negara yang di survei (Kunandar, 2007: 1-2).

Upaya peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan dengan berbagai cara atau pendekatan, salah satunya adalah pemberdayaan sumber daya pendidikan dilakukan dengan program peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga guru secara sistematis dan berkesinambungan.

Guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan (Depdiknas, 2005)

UU RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), dan memiliki sertifikat pendidik.

Kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses

pendidikan salah satunya adalah dilakukan melalui penguatan program rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang, jenis pendidikan, dan pemerataan penyebaran secara geografis (Depdiknas, 2005: 21).

Kebijakan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan guru secara merata ditegaskan dalam UU No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 24) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota maupun penyelenggara pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal serta menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah.

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah sangat sungguh-sungguh dalam mengupayakan terpenuhinya kebutuhan

guru, baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun kompetensi secara merata. Tantangannya adalah, bagaimana mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut mengingat kondisi dan kemampuan masing-masing daerah berbeda.

Secara nasional rasio guru dengan murid pada pendidikan dasar telah memenuhi kualifikasi baik, yaitu 1 : 20. Namun dalam pendistribusiannya atau penempatannya mengalami masalah, karena terjadi penumpukan jumlah guru di tempat-tempat tertentu dan sekolah-sekolah tertentu, sementara di daerah atau tempat lain terjadi sebaliknya, mengalami kekurangan guru baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Sajim, 2007: 2).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010 Kabupaten Sleman memaparkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD pada tahun 2004 sebesar 95,97% dan angka rasio murid terhadap guru sebesar 17. Di samping itu juga dipaparkan tentang perkembangan jumlah guru, sekolah, ruang kelas dan siswa SD dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Guru, Sekolah, Kelas, dan Siswa SD di Kabupaten Sleman Tahun 2000 s/d 2004

No	Jumlah	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Guru	4.690	4.687	4.891	4.292	4.860
2	Sekolah	538	533	519	503	514
3	Kelas	3.505	3.450	3.396	3.192	3.527
4	Siswa	76.279	77.326	78.586	78.304	78.925

Sumber: RPJM 2005-2010 Kab. Sleman

Tabel di atas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 2000-2005 terjadi perubahan jumlah sekolah, jumlah kelas, jumlah siswa dan guru SD. Perubahan yang menarik dan layak untuk dicermati adalah yang terjadi pada kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2002-2003 terjadi penurunan jumlah sekolah, jumlah kelas, jumlah siswa dan guru SD, dan sebaliknya pada tahun 2003-2004 terjadi kenaikan jumlah sekolah, jumlah kelas, jumlah siswa dan guru.

Berdasarkan laporan resmi yang dikeluarkan oleh BPS bersama Bappeda Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa pada tahun 2007 besarnya rasio murid terhadap guru pada sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sleman sebesar 14, angka ini dibawah standar ideal yang berlaku. Idealnya perbandingan antara guru dengan murid adalah 1:20, dengan pengertian lain seorang guru idealnya mengajar 20 murid.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan dilalui oleh tiga jalan raya yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta memiliki kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak merata akan berpengaruh terhadap kebutuhan fasilitas dan pelayanan sosial. Masalah yang timbul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak merata adalah terjadinya kekurangan fasilitas dan pelayanan pendidikan pada tempat-tempat yang pertumbuhan penduduknya tinggi, dan sebaliknya terjadi kelebihan fasilitas dan pelayanan pendidikan pada tempat-tempat

lain yang jumlah penduduk usia sekolahnya cenderung menurun. Bila yang terjadi demikian, maka pelaksanaan pendidikan dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan rasio murid terhadap guru seperti disebutkan di atas dapat diketahui bahwa dari segi jumlah, kebutuhan guru SD di Kabupaten Sleman tampaknya sudah tercukupi, bahkan terjadi kelebihan guru. Masalahnya adalah, masih terdapat beberapa sekolah yang kekurangan guru, dan sebaliknya di sisi lain terjadi kelebihan guru. Di samping itu dari hasil penelitian pendahuluan diperoleh informasi bahwa masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki guru berkualifikasi seperti yang dikehendaki dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu, apabila kondisi yang demikian tidak segera diatasi, maka kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru secara merata sulit terwujud di Kabupaten Sleman.

Informasi tentang jumlah dan kualifikasi guru SD beserta distribusinya di tiap-tiap kecamatan dan sekolah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan guru secara merata, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi ketersediaan dan kebutuhan guru SD. Hal ini penting mengingat sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang memiliki APM paling tinggi di Kabupaten Sleman dan tersebar di seluruh desa/kelurahan.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan dan tingkat kecukupan guru SD di Kabupaten Sleman baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun kompetensinya.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemerintah telah

melakukan berbagai kebijakan di bidang pendidikan, diantaranya adalah pencanangan program wajib belajar 9 tahun (SD dan SLTP), dan dikeluarkannya UU RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dan UU RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru merupakan pekerjaan profesi yang memiliki kedudukan sentral dan peran ganda dalam sistem pendidikan di Indonesia, karena itu kedudukannya tidak bisa digantikan oleh apapun, lebih-lebih pada jenjang pendidikan dasar.

Cheng Wong dari Zhejian Cina (Mulyasa (2008: 9) melaporkan empat karakteristik sekolah dasar yang unggul (berprestasi), yaitu: (1) adanya dukungan pendidikan yang konsisten dari masyarakat, (2) tingginya derajat profesionalisme di kalangan guru, (3) adanya tradisi jaminan kualitas (*quality assurance*) dari sekolah, dan (4) adanya harapan yang tinggi dari siswa untuk berprestasi.

Hay McBer dalam Moore (2004: 39-40) mengemukakan sembilan ciri ketrampilan dalam mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang efektif, yakni: (1) memberikan harapan yang tinggi (*high expectations*), (2) melakukan perencanaan (*planning*), (3) menentukan metode dan strategi (*methods and strategies*), (4) pengelolaan siswa (*pupil management*), (5) pengelolaan waktu dan sumber daya (*time and resource management*), (6) waktu dalam tugas (*time on task*), (7) penyampaian pelajaran (*lesson flow*), pengaturan keadaan dan pekerjaan rumah yang menarik (*setting appropriate and challenging homework*).

Seorang guru yang profesional harus memiliki kreativitas, pengetahuan yang luas dan inovatif. Pugach (2006: 8) mengemukakan bahwa, seorang guru harus membuat sesuatu yang berbeda, tidak hanya melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun.

Bagian penting dalam proses belajar mengajar adalah bagaimana seorang guru melakukan refleksi terhadap cara mengajar agar lebih baik. Guru profesional adalah guru yang mampu meningkatkan kualitas pengajarannya untuk membantu siswa dalam perkembangan belajarnya, dengan melakukan identifikasi terhadap kinerjanya maka mereka mampu mengembangkan dan menjalankan bidang pekerjaannya lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan unit analisis kecamatan, disamping karena alasan keterjangkauan dan ketersediaan data, peneliti juga ingin melihat pola distribusi dan ketersediaan guru SD di masing-masing kecamatan yang lokasi dan kondisi geografisnya tidak sama. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, yaitu evaluasi terhadap kecukupan guru SD di Kabupaten Sleman, yang dijadikan subjek penelitian adalah guru-guru SD/MI negeri maupun swasta, sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah: (1) ketersediaan guru SD, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya, (2) ketercukupan guru SD berdasarkan standar jumlah, kualifikasi akademik, dan kompetensi guru, serta (3) kondisi dan pola distribusinya di masing-masing kecamatan.

Untuk menentukan angka kecukupan guru dilakukan analisis terhadap ketersediaan guru yang dibandingkan dengan standar minimal jumlah guru yang harus terpenuhi. Dari hasil perbandingan ini selanjutnya dilakukan klasifikasi dengan tiga

kategori, yaitu: “kurang” untuk nilai perbandingan  $<1$ , “cukup” untuk nilai perbandingan  $= 1$ , dan “lebih” untuk nilai perbandingan  $>1$ .

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan tiga metode atau sumber data yang berbeda, yakni dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam proses ini, data yang diperoleh diperiksa secara silang dengan menggunakan sumber atau metode yang berbeda, tujuannya adalah agar dapat menentukan dan memperoleh kebenaran data.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, sedangkan efektifitas dan efisiensi dari ketersediaan guru ditentukan berdasarkan nilai rasio jumlah murid terhadap jumlah guru, hasilnya kemudian dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guru SD. Apabila nilai rasio lebih besar dari standar berarti fasilitas tersebut tidak efisien, dengan kata lain terjadi pemborosan sumberdaya, sedangkan apabila nilai rasio lebih kecil dari standar, maka fasilitas tersebut perlu ditambah agar terjadi keseimbangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun pelajaran 2008/2009, jumlah guru SD/MI di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 6.455 orang guru, jumlah guru terbesar terdapat di Kecamatan Depok yakni sebanyak 872 orang guru atau sekitar 13,51%, sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Turi, yakni sebanyak 208 orang guru atau sekitar 3,22%. Guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum S1/D-IV bidang pendidikan SD/MI (keguruan) adalah sebanyak 2.018

orang guru atau sekitar 31%, dan yang bersertifikat profesi guru sebanyak 656 orang guru atau sekitar 10% dari sejumlah guru yang ada. Persentase ini memberikan informasi bahwa guru yang tidak sesuai dengan standar guru jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 69% tidak sesuai dengan standar kualifikasi akademik, dan sekitar 90% dari sejumlah guru yang ada belum memenuhi standar kompetensi guru.

### Kondisi Kecukupan Guru SD/MI Berdasarkan Standar Jumlah

Hasil Evaluasi terhadap ketersediaan dan kebutuhan guru SD di Kabupaten Sleman diperoleh angka kecukupan guru berdasarkan standar jumlah  $>1$  (kategori lebih) dengan angka rata-rata kecukupan guru sebesar 1,39 (kategori lebih), angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru berdasarkan jumlahnya sudah cukup, bahkan terjadi kelebihan guru sebesar 0,39 atau sekitar 39 persen dari kebutuhan minimal jumlah guru. Angka kecukupan tertinggi adalah sebesar 2,15 (kategori lebih) terdapat di Kecamatan Minggir, sedangkan tingkat kecukupan terendah sebesar 1,18 (kategori lebih) terdapat di Kecamatan Kalasan, rentang nilai (*range*) ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru di tiap-tiap kecamatan sudah cukup bahkan terjadi kelebihan, namun kondisinya yang tidak sama, untuk lebih jelasnya, distribusi kondisi kecukupan jumlah guru dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Kondisi Kecukupan Guru Menurut Standar Jumlah Kabupaten Sleman Tahun 2009

Interval Pencapaian Angka Kecukupan Guru	Jumlah Kecamatan	
	f	%
1,18 - 1,50	11	64,71
1,51 - 1,83	5	29,41
1,84 - 2,16	1	5,88
1,18 - 2,16	17	100,00

Sumber: hasil penelitian, 2009

Lebih lanjut, dari hasil evaluasi terhadap ketersediaan guru dari masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa angka kecukupan guru di sekolah cukup bervariasi, di satu sisi ada beberapa sekolah yang memiliki angka kecukupan guru sangat tinggi, sedangkan di sisi lain terdapat sekolah yang memiliki angka kecukupan guru <1

(kategori kurang) atau memiliki jumlah guru dibawah standar kebutuhan jumlah guru. Rangkuman angka kecukupan guru yang terdiri dari nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum angka kecukupan guru dari masing-masing kecamatan dapat dilihat dari Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Rangkuman Angka Kecukupan Guru SD/MI Menurut Standar Jumlah Kabupaten Sleman Tahun 2009

No.	Kecamatan	Angka Kecukupan Guru Menurut Standar Jumlah		
		Rata-rata	Maksimum	Minimum
1.	Sleman	1,28	3,33	0,90
2.	Mlati	1,43	3,33	0,76
3.	Gamping	1,39	3,00	0,77
4.	Godean	1,44	7,00	0,82
5.	Moyudan	1,75	4,00	0,92
6.	Minggir	2,16	5,00	1,10
7.	Seyegan	1,67	5,00	1,00
8.	Tempel	1,71	4,00	0,94
9.	Turi	1,32	3,00	0,83
10.	Pakem	1,50	5,00	0,83
11.	Cangkringan	1,52	3,33	0,90
12.	Ngemplak	1,26	2,20	0,00
13.	Ngaglik	1,28	3,20	0,71
14.	Depok	1,21	2,80	0,68

No.	Kecamatan	Angka Kecukupan Guru Menurut Standar Jumlah		
		Rata-rata	Maksimum	Minimum
15.	Kalasan	1,18	3,33	0,89
16.	Berbah	1,24	2,55	0,83
17.	Prambanan	1,31	4,50	0,86

Sumber: Perhitungan hasil penelitian

Dari Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kecukupan guru di sekolah tidak merata (bervariatif), yaitu ditunjukkan dengan adanya rentang nilai (*range*) angka kecukupan guru di beberapa kecamatan yang cukup besar dan bervariatif, ini membuktikan bahwa kondisi dan distribusi guru tidak merata, baik antar sekolah maupun kecamatan.

Kondisi dan pola distribusi angka kecukupan guru berdasarkan standar jumlah dipengaruhi oleh faktor lokasi, yakni beberapa kecamatan yang jauh dengan Kota Yogyakarta cenderung memiliki angka kecukupan guru yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan yang dekat atau berbatasan dengan Kota Yogyakarta.

#### **Kecukupan Guru SD Berdasarkan Standar Kualifikasi Akademik.**

Dari hasil evaluasi diperoleh informasi bahwa pencapaian angka kecukupan guru

berdasarkan standar kualifikasi akademik < 1 (kategori kurang) dengan rata-rata angka kecukupan guru sebesar 0,43, angka kecukupan tertinggi sebesar 0,55, dan angka kecukupan terendah sebesar 0,22, angka-angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru berdasarkan standar kualifikasi akademik belum cukup, dan jauh dibawah kebutuhan minimal jumlah guru.

Kondisi dan pola distribusi angka kecukupan guru berdasarkan standar kualifikasi akademik dipengaruhi oleh faktor lokasi, yakni beberapa kecamatan yang jauh dengan Kota Yogyakarta cenderung memiliki angka kecukupan yang lebih rendah dibanding dengan beberapa kecamatan yang dekat atau berbatasan dengan Kota Yogyakarta, rangkuman kondisi kecukupan guru berdasarkan standar kualifikasi akademik dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4.** Kondisi Kecukupan Guru SD/MI Menurut Standar Kualifikasi Akademik Kabupaten Sleman Tahun 2009

Interval Pencapaian Angka Kecukupan Guru	Jumlah Kecamatan	
	f	%
0,21 - 0,33	2	11,76
0,34 - 0,45	7	41,18
0,46 - 0,57	8	47,06
0,21 - 0,56	17	100,00

Sumber: hasil penelitian, 2009

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan guru di tiap-tiap sekolah diperoleh informasi bahwa kondisi kecukupan guru bervariasi, di satu sisi terdapat sekolah yang memiliki angka kecukupan guru  $>1$  (kategori lebih), di sisi lain terdapat sekolah yang belum

memiliki guru berkualifikasi akademik S1 atau D-IV bidang keguruan, rangkuman nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah angka kecukupan guru dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5** Rangkuman Angka Kecukupan Guru SD/MI Menurut Standar Kualifikasi Akademik di Kabupaten Sleman Tahun 2009

No.	Kecamatan	Angka Kecukupan Guru Menurut Standar Kualifikasi Akademik		
		Rata-rata	Maksimum	Minimum
1.	Sleman	0,42	1,25	0,00
2.	Mlati	0,51	1,50	0,00
3.	Gamping	0,49	1,80	0,00
4.	Godean	0,47	2,00	0,00
5.	Moyudan	0,55	1,33	0,14
6.	Minggir	0,55	2,50	0,10
7.	Seyegan	0,40	1,00	0,00
8.	Tempel	0,51	1,33	0,00
9.	Turi	0,39	1,00	0,00
10.	Pakem	0,46	1,80	0,00
11.	Cangkringan	0,22	0,67	0,00
12.	Ngemplak	0,35	0,86	0,00
13.	Ngaglik	0,34	2,00	0,00
14.	Depok	0,48	1,17	0,00
15.	Kalasan	0,39	1,60	0,00
16.	Berbah	0,40	1,00	0,10
17.	Prambanan	0,33	0,88	0,00

Sumber: Perhitungan hasil penelitian

Dari Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa angka kecukupan guru antara sekolah yang satu dengan yang lain di masing-masing kecamatan bervariasi, ini ditunjukkan dengan adanya rentang nilai (*range*) angka kecukupan tertinggi dengan terendahnya yang besar hampir terjadi di semua kecamatan.

#### **Kondisi Kecukupan Guru SD Berdasarkan Standar Kualifikasi Kompetensi**

Pada tahun 2008 jumlah guru yang lulus sertifikasi guru sebanyak 656 orang guru atau baru sekitar 10 % dari 6.455 orang guru, jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Depok dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Cangkringan.



Hasil evaluasi memberikan informasi bahwa pencapaian angka kecukupan guru berdasarkan standar kompetensi guru masih rendah, yakni  $<1$  (kategori kurang), artinya ketersediaan guru berdasarkan standar

kompetensi guru belum cukup. Kondisi kecukupan guru berdasarkan standar kualifikasi akademik dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6.** Kondisi Kecukupan Guru SD/MI Menurut Standar Kompetensi Guru Kabupaten Sleman Tahun 2009

Interval Pencapaian Angka Kecukupan Guru	Jumlah Kecamatan	
	f	%
0,04 - 0,10	6	35,29
0,11 - 0,17	7	41,18
0,18 - 0,24	4	23,53
0,04 - 0,24	17	100,00

Sumber: hasil penelitian, 2009

Rata-rata angka kecukupan guru sebesar 0,14, dengan angka kecukupan tertinggi sebesar 0,23, dan angka kecukupan terendah sebesar 0,05, angka-angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru yang bersertifikat profesi guru belum cukup dan

distribusinya tidak merata. Rangkuman nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah angka kecukupan guru berdasarkan standar kompetensi dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7.** Rangkuman Angka Kecukupan Guru SD Menurut Standar Kompetensi Guru Kabupaten Sleman 2008/2009

No.	Kecamatan	Angka Kecukupan Guru Menurut Standar Kompetensi Guru		
		Rata-rata	Maksimum	Minimum
1.	Sleman	0,15	0,75	0,00
2.	Mlati	0,22	1,00	0,00
3.	Gamping	0,14	0,43	0,00
4.	Godean	0,08	0,50	0,00
5.	Moyudan	0,22	1,00	0,00
6.	Minggir	0,18	0,75	0,00
7.	Seyegan	0,15	0,50	0,00
8.	Tempel	0,12	0,67	0,00
9.	Turi	0,09	0,33	0,00
10.	Pakem	0,12	0,50	0,00
11.	Cangkringan	0,08	0,50	0,00

No.	Kecamatan	Angka Kecukupan Guru Menurut Standar Kompetensi Guru		
		Rata-rata	Maksimum	Minimum
12.	Ngemplak	0,11	0,29	0,00
13.	Ngaglik	0,15	0,67	0,00
14.	Depok	0,23	0,66	0,00
15.	Kalasan	0,09	0,50	0,00
16.	Berbah	0,06	0,20	0,00
17.	Prambanan	0,05	0,33	0,00

Sumber: Perhitungan hasil penelitian

Dari Tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kecukupan guru di masing-masing kecamatan masih jauh dari cukup dan tidak merata (bervariatif), ini ditunjukkan dengan adanya rentang nilai (*range*) angka kecukupan guru yang cukup tinggi di beberapa kecamatan. Dari hasil evaluasi terhadap ketersediaan guru di sekolah dari masing-masing kecamatan dapat diketahui bahwa kondisi kecukupan guru menurut standar kompetensi antara sekolah satu dengan lainnya bervariasi, yakni di satu sisi terdapat sekolah yang memiliki angka kecukupan guru >1 (kategori lebih), tetapi di sisi lain terdapat sekolah dengan angka kecukupan 0 (nol), artinya belum memiliki guru yang berkualifikasi lulus uji kompetensi.

Kondisi dan pola distribusi kecukupan guru berdasarkan standar kompetensi guru dipengaruhi oleh faktor lokasi, yakni beberapa kecamatan yang jauh dari Kota Yogyakarta cenderung memiliki angka kecukupan yang lebih rendah dibanding dengan beberapa kecamatan yang dekat atau berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Dengan demikian memiliki pola distribusi yang sama seperti pada kondisi kecukupan guru berdasarkan standar kualifikasi akademik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Proporsi guru yang berkualifikasi akademik S1 dan memiliki kompetensi keguruan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan jumlahnya masih kecil.
2. Jumlah guru SD/MI di Kabupaten sudah cukup, namun distribusinya tidak sesuai dengan sebaran siswa
3. Ketersediaan guru SD/MI berdasarkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru masih jauh di bawah standar kebutuhan, di samping itu distribusinya juga tidak merata baik antar sekolah maupun kecamatan.
4. Pola distribusi ketersediaan, kualifikasi akademik dan kompetensi guru di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh faktor lokasi, yakni beberapa kecamatan yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta memiliki kecukupan guru yang lebih baik.

### Saran

1. Dalam melakukan perencanaan dan penempatan guru SD di Kabupaten Sleman perlu mempertimbangkan jumlah dan sebaran siswa serta

- proyeksinya untuk beberapa tahun kedepan agar jumlah guru sesuai dengan kebutuhan guru di tiap-tiap kecamatan dan sekolah.
2. Perlu dilakukan redistribusi guru sesuai dengan kebutuhan guru di tiap-tiap kecamatan dan sekolah dengan memperhatikan jumlah, kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
  3. Pemerintah perlu memberi dorongan dan kemudahan akses bagi guru-guru SD yang ingin meningkatkan kualifikasinya, mengingat angka kecukupan guru berdasarkan standar kualifikasi akademik dan kompetensinya masih rendah.
  4. Dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru, Dinas Pendidikan perlu memberi perhatian dan pembinaan secara khusus bagi guru-guru SD yang lokasinya jauh dari Kota Yogyakarta, mengingat kondisi kualifikasi akademik dan kompetensinya tertinggal dengan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional*.
- Depdiknas. 2005. *Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005- 2009*. Diambil pada tanggal 18 Februari 2009, dari <http://www.pnfi.depdiknas.go.id/informasi/20090313110838/Renstra-Depdiknas-2005-2009.html>.
- Depdiknas. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008*. Jakarta: Ditjen PMPTK
- Kabupaten Sleman. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010*. Sleman: Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moore, A. 2004. *The Good Teacher: Dominant Discourses in Teaching and Teacher Education*. London and New York: Routledge Falmer.
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pugach, M.C. 2006. *Because Teaching Matters*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sajim, S.M. 2007. *Panduan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru*. Diambil pada tanggal 10 Des. 2008, dari <http://sertifikasiguru.org/index.php?mact=News.cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=77&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=63>.